

ARAH GERAKAN MAHASISWA: Gerakan Politik Ataukah Gerakan Moral?

Sunyoto Usman^{*)}

Abstract

As a politically-active segment of the society, university students take part in shaping how political system works. Historical tracing of student movement during the post-independent period offered in this article provides an empirical and contextual basis for the student to decide, whether the movement is constructed as political movement or moral movement.

Kata kunci : Gerakan mahasiswa, gerakan politik, gerakan moral

Pendahuluan

Perbedaan pandangan tentang gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral atau gerakan politik akhir-akhir ini sayup-sayup mulai terdengar lagi. Dalam sejumlah diskusi kecil ada yang mulai mempertanyakan lagi mungkinkah gerakan mahasiswa dikembangkan ke arah gerakan politik? Pertanyaan ini terlontar ketika ditengarai para politisi profesional ternyata lamban mengantisipasi keadaan. Krisis ekonomi dan krisis politik tidak kunjung reda. Korupsi masih merajalela dan belum ada tanda-tanda dapat dihentikan. Pada saat ini masih terjadi *public distrust* yang membuat pelbagai aturan

dan keputusan publik tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, di samping *money politics* mewarnai hampir semua proses pemilihan kepala daerah di seluruh penjuru tanah air.

Di lain pihak, sejumlah diskusi kecil lainnya tetap menginginkan gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral. Bagi mereka gerakan moral jauh lebih berharga karena akan membuat mahasiswa dapat melihat pelbagai persoalan politik dengan lebih jernih atau terhindar dari *vested interests*. Lalu kemana seharusnya gerakan mahasiswa diarahkan, menjadi gerakan moral ataukah menjadi gerakan politik?

Tulisan ini berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan ini melalui refleksi sejarah kontemporer gerakan mahasiswa di Indonesia. Tulisan ini pertama-tama akan mendudukan mahasiswa dalam sistem politik. Mereka tampil sebagai bagian dari elit politik yang senantiasa ambil bagian dalam mewarnai bekerjanya sistem tersebut. Oleh karena kekuatan sosial dan kekuatan intelektual yang melatarbelakangi gerakan-gerakan mahasiswa tersebut berbeda, dan ideologi yang membingkai gerakan mereka juga berbeda, maka seperti ditunjukkan nanti bentuk-bentuk organisasi merekapun dari tahun ke tahun juga berbeda. Uraian berikut akan memaparkan perbedaan itu, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang implikasi perbedaan tersebut terhadap arah gerakan politik mahasiswa.

Keterlibatan Mahasiswa dalam Sistem Politik

Bentuk partisipasi masyarakat pada kegiatan masalah politik oleh Woshinsky digambarkan seperti layang-layang terbalik.¹ Di bagian atas adalah kelompok elit minoritas yang berpengaruh terhadap keputusan politik dan memiliki kemampuan mengerahkan massa untuk gerakan politik. Kategori kelompok ini disebut *influentials* (tokoh yang berpengaruh) yang jumlahnya diperkirakan hanya sekitar 1-3%. Kelompok di bawahnya disebut *participants* yaitu mereka yang secara reguler aktif dalam kegiatan politik yang jumlahnya sekitar 10-20%. Kelompok di bawahnya lagi disebut *citizens* atau mereka

^{*)} Staf Pengajar Fisipol, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

¹ Woshinsky, Oliver H., *Culture and Politics*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1995, p.127

yang terlibat pada kegiatan politik hanya pada saat-saat tertentu saja. Jumlah mereka diperkirakan sebesar 40-70%, jadi lebih besar dibandingkan dengan dua kategori kelompok yang tadi telah disebutkan. Kemudian, kelompok yang berada pada lapisan paling bawah disebut *apathetics* yaitu mereka tidak tertarik pada pelbagai kegiatan politik dan jumlahnya diperkirakan sekitar 20-40%. Mereka pada umumnya menganggap bahwa politik adalah kotor, dunia politik sarat manipulasi dan hanya mementingkan kekuasaan, karena itu sebaiknya dihindari dan merasa tidak ada gunanya ikut berpartisipasi di dalamnya.

Sampai saat ini kelihatannya belum ada informasi yang pasti bagaimana bentuk partisipasi mahasiswa Indonesia terhadap masalah politik. Apakah bentuk partisipasi itu seperti dibayangkan oleh Woshinsky berupa layang-layang terbalik? Atau, mungkinkah ada bentuk lain yang lebih unik?

Andaikata betul bahwa bentuk partisipasi mahasiswa Indonesia terhadap masalah politik mirip dengan yang digambarkan oleh Woshinsky tersebut, maka jumlah mahasiswa yang aktif dalam kegiatan politik tentu juga tidak begitu banyak. Sebagian besar dari mereka berpartisipasi dalam kegiatan politik hanya pada saat tertentu ketika institusi birokrasi dan institusi politik tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan oleh rakyat.

Hanya saja, meskipun jumlah aktivis mahasiswa tidak besar, pelbagai bukti sejarah memperlihatkan bahwa dampak dari gerakan mahasiswa sangat besar. Gerakan mahasiswa telah terbukti mampu mengubah peta politik nasional, bahkan mampu menumbangkan sebuah rejim penguasa. Karena itu tidak mengherankan apabila kekuatan mahasiswa sering digolongkan sebagai kelompok pendombrak dan penakluk rejim penguasa yang sangat efektif. Mereka seringkali juga digolongkan sebagai 'gerilyawan kota', yang bisa mempengaruhi bahkan membalik keputusan-keputusan politik.

Catatan perjalanan sejarah politik Indonesia juga memperlihatkan gambaran itu. Gerakan mahasiswa di Indonesia senantiasa muncul mendahului kelahiran rejim baru. Sedikitnya ada dua buku terbitan baru yang sangat baik menggambarkan peran gerakan mahasiswa dalam perubahan politik di Indonesia yaitu yang

ditulis oleh Arbi Sanit² dan satu lagi yang diedit oleh Muridan S. Widjojo. Dalam dua buku tersebut dibahas dengan cukup jelas pelbagai kekuatan sosial dan kekuatan intelektual yang melatarbelakangi gerakan mahasiswa di Indonesia sejak awal tahun 1960an sampai dengan tumbanginya rejim Orde Baru. Dalam dua buku tersebut juga diuraikan ciri ideologi apa saja yang membingkai gerakan itu, apa sasaran yang hendak dicapai serta bagaimana bentuknya di lapangan. Uraian lain yang juga cukup baik memaparkan gerakan mahasiswa dari tahun 1966-1998 adalah tesis S-2 yang ditulis oleh Hamka.³ Dalam tesis ini Hamka berhasil memetakan gerakan mahasiswa Indonesia 1966-1988 dengan memperhitungkan dan mengamati variabel-variabel: struktur kesempatan, isu strategis, organisasi, strategi, basis dukungan, perimbangan dan prestasi yang dicapai. Kendatipun fokus studi ini adalah gerakan mahasiswa 1966-1998, untuk memperdalam analisis komparatif terhadap struktur kekuasaan, gerakan-gerakan mahasiswa tahun 1970an dan tahun 1990an ikut menjadi pengamatan Hamka.

Arah gerakan dan organisasi mahasiswa

Seperti dikemukakan oleh Abdul Mun'im DZ⁴, gerakan mahasiswa 1966 terkait jelas dengan pertarungan para elit politik era Orde Lama yang ketika itu terbelah kedalam beberapa kekuatan antara lain: kekuatan Soekarno yang anti Amerika, kekuatan yang pro-Barat, kekuatan militer dan komunis. Kekuatan militer sendiri terbelah dua: ada yang menjadi pendukung Soekarno dan ada pula yang menjadi pendukung Jenderal Soeharto. Pertarungan tersebut telah menciptakan kondisi ekonomi menjadi porak-poranda, sehingga bangsa ini dari hari ke hari dirundung ketegangan politik yang

² Sanit, Arbi, *Pergolakan Melawan Kekuasaan, Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*, Pustaka Pelajar dan Insist Press, Yogyakarta, 1999. Muridan S. Widjojo et. al., *Penakluk Rezim Orde Baru, Gerakan Mahasiswa '98*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1999.

³ Hamka, *Gerakan Mahasiswa Indonesia (Studi Perbandingan Antara Gerakan Mahasiswa 1966 dan Gerakan Mahasiswa 1998)*, Tesis tidak dipublikasikan Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2000

⁴ Mun'im DZ, Abdul, 'Gerakan Mahasiswa 1966 Di Tengah Pertarungan Politik Elite' dalam Muridan S. Widjojo et. al., *Penakluk Rezim Orde Baru, Gerakan Mahasiswa '98*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 28-42

kemudian pada bulan September 1965 berakumulasi dalam upaya kudeta atau peristiwa G30S/PKI. Peristiwa ini telah memberi stimulan mahasiswa (bersama-sama dengan partai politik, organisasi pemuda dan organisasi-organisasi massa lainnya) untuk melakukan gerakan politik terutama dengan tuntutan pembubaran PKI yang telah terbukti berbuat makar.

Pada awalnya gerakan mahasiswa tersebut hanya bersifat lokal, di kampusnya sendiri atau kedaerahan. Gerakan mahasiswa baru mapan setelah mereka terhimpun ke dalam organisasi KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang berdiri di hampir semua kota besar di seluruh penjuru tanah air. Selanjutnya pada bulan Juni 1966 mereka berhasil merumuskan konsep yang lebih sistematis dan provokatif sesuai dengan nuansa politik yang disebut Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang isinya adalah: bubarkan PKI, *retool* kabinet Dwikora dan turunkan harga barang. Meskipun para mahasiswa menegaskan bahwa gerakan itu adalah gerakan moral (*moral force*) dan dibangun semata-mata untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan kebenaran, pemerintah sendiri ketika itu mencurigai sebagai gerakan yang ditunggangi oleh kepentingan Amerika melalui CIA. Sejumlah tokoh KAMI kemudian ditahan, dan pemerintah berusaha keras bagaimana agar gerakan politik mereka tidak menyebar luas kemana-mana.

Gerakan politik yang dilakukan KAMI kembali terorganisir setelah memperoleh dukungan militer dan sejumlah partai politik dan organisasi massa. Terutama dukungan militer telah membuka jalan lebar bagi KAMI untuk meneruskan langkah merealisasi tuntutananya, seperti dilukiskan oleh Abdul Mun'in DZ sebagai berikut:

..... Kostrad dan RPKAD telah lama memberi dukungannya terhadap gerakan mahasiswa bahkan terang-terangan melindungi mereka selama melakukan demonstrasi. Dengan suasana itu KAMI berharap akan lebih kuat menekan Presiden Soekarno agar segera meluluskan tuntutananya. Sebagaimana dikisahkan oleh Kemal Idris bahwa untuk menghadapi berbagai kemungkinan penculikan dan penangkapan oleh aparat Cakrabirawa, maka tokoh KAMI Pusat mendapat perlindungan dari Kostrad. Rapat-rapat

pengurus untuk mengatur pola dan strategi gerakan dilakukan dari sana.⁵

Selanjutnya, perjalanan politik di Indonesia pada periode itu ditandai oleh aliansi mahasiswa-militer (terutama Angkatan Darat). Melalui doktrin dwi-fungsi ABRI, kekuatan militer memperoleh legitimasi untuk berpartisipasi aktif bahkan mendominasi kekuasaan politik nasional. Militer tidak hanya memiliki tugas keamanan saja, tetapi lebih daripada itu adalah melakukan peran dalam pelbagai bidang kehidupan masyarakat. Sesudah itu kegiatan politik mahasiswa mereda, gaungnya tidak nyaring lagi, dan hampir seluruhnya terserap dalam kekuasaan di bawah komando Jenderal Soeharto. Kendatipun begitu tidak semua mahasiswa larut dalam kekuasaan rejim ini. Seperti dikemukakan oleh Arief Budiman⁶ bahwa ketika sebagian tokoh mahasiswa diangkat menjadi anggota DPR (bahkan beberapa orang diantaranya kemudian menjadi menteri), di samping ada yang menyambutnya sebagai bagian dari meneruskan perjuangan sampai tuntas, ternyata ada pula yang melihatnya sebagai adanya *vested interests* di kalangan tokoh-tokoh mahasiswa itu sendiri. Kalangan yang disebutkan terakhir inilah yang kemudian mengembangkan pikiran-pikiran kritis dan suaranya lantang menentang pelbagai bentuk penyimpangan meskipun konsekuensinya mereka harus tersingkir.

Aliansi mahasiswa-militer ternyata tidak berlangsung lama, karena mulai awal tahun 1970an benih-benih perbedaan mulai mencuat ke permukaan. Di satu pihak, pemerintah melalui peningkatan penanaman modal asing dan pemeliharaan stabilitas politik merasa telah sukses memperbaiki kondisi perekonomian yang porak-poranda, kemudian berhasil menjaga pertumbuhannya. Seperti dikutip oleh Arbi Sanit,⁷ dalam Pelita I, *gross national product* Indone-

⁵ Ibid, hlm 32

⁶ Budiman, Arief, 'Catatan Kritis Mencoba Memahami Si Bintang Lapangan 1998' dalam Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan, Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*, Pustaka Pelajar dan Insist Press, Yogyakarta, 1999, hlm. xiv

⁷ Sanit, Arbi, 'Gerakan Mahasiswa 1970-1973: Pecahnya Bulan Madu Politik', dalam Muridan S. Widjojo et. al., *Penakluk Rezim Orde Baru, Gerakan Mahasiswa '98*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm.

sia naik 42% dengan rata-rata 7.5% per tahun. Pendapatan pemerintah tahun 1970 meningkat sebesar 80% dari tahun 1968 sehingga menjadi Rp 334,7 milyar. Ekspor juga meningkat cukup pesat yaitu dari US\$864 juta (1968) menjadi US\$1.001 (1970). Pertumbuhan ekonomi itu terkait dengan meningkatnya penanaman modal asing yang pada tahun 1970 diperkirakan sebanyak US\$1,1 milyar yang dilakukan oleh 200 perusahaan asing. Ketika itu pinjaman dari negara-negara donor (terutama Jepang dan Amerika Serikat) yang tergabung dalam IGGI juga sangat besar dan dari tahun ke tahun terus merangkak naik dengan rincian berturut-turut sebagai berikut: US\$200 juta (1967), US\$325 juta (1968), US\$500 juta (1969), US\$571 juta (1970-71). Catatan lain memperlihatkan bahwa peningkatan penanaman modal asing dan kenaikan harga minyak (*the oil bonanza*) telah memacu pertumbuhan lebih dari 7% (1968-1981). Pertumbuhan itu menurun menjadi 4.3% (1981-1988), ketika harga minyak di pasar internasional menurun. Penurunan itu juga akibat dari dampak intervensi dan regulasi pemerintah pada akhir 1970an dan awal 1980an. Kemudian tahun 1989-1993 pertumbuhan itu naik lagi menjadi sekitar 7% per tahun.⁸ Pertumbuhan itu juga semakin menambah keyakinan rejim penguasa bahwa mereka sudah menapak pada jalan yang benar. Karena itu meskipun banyak kritikan dilontarkan kepada kebijaksanaan pemerintah yang dirasakan semakin tidak adil dan tidak merata, mereka jalan terus dengan model pembangunan yang telah dikembangkan.

Akan tetapi di lain pihak, mahasiswa merasa bahwa perbaikan dan pertumbuhan itu adalah semu belaka, terutama karena bersamaan dengan itu korupsi merajalela, dan kesenjangan sosial semakin dalam. Ketika itu juga lahir borjuis *client*⁹ yang sangat serakah. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang tidak memiliki ketrampilan dan kemampuan berwirausaha yang cukup untuk terjun ke dunia bisnis. Mereka berhasil terjun dan bergerak dalam dunia bisnis hanya karena memiliki akses yang kuat dengan rejim penguasa. Mereka menjadi

pengusaha hanya karena hubungan clientelisme. Karena itu tidak mengherankan apabila dalam mengembangkan usahanya mereka lebih sering mengembangkan cara-cara kolusi yang tidak *fair* daripada perhitungan ekonomi yang rumit. Ironisnya para pengusaha kategori inilah yang nampak lebih sukses dibandingkan dengan mereka yang memang memiliki jiwa wiraswasta atau naluri bisnis. Justru para pengusaha yang disebut dalam kategori terakhir ini yang seringkali banyak terhalang dan sukar berkembang.

Kesenjangan, ketidakadilan, penderitaan rakyat, korupsi dan manipulasi semacam itulah yang kemudian mengakhiri aliansi mahasiswa-militer. Mulai tahun 1970 sampai dengan awal tahun 1980an, konflik di antara dua kekuatan politik ini antara lain ditandai peristiwa Malari 1974, gerakan anti Soeharto tahun 1978 dan penolakan asas tunggal Pancasila (awal 1980an). Peristiwa Malari 1974 adalah puncak dari akumulasi kekecewaan mahasiswa terhadap kebijaksanaan ekonomi dan politik dipilih pemerintah yang dinilai tidak hanya semakin menambah penderitaan rakyat tetapi juga semakin memperlihatkan arogansi kekuasaan, otoritarianisme dan sangat represif. Peristiwa Malari 1974 terjadi bersamaan dengan kehadiran Perdana Menteri Jepang Tanaka yang ketika itu dianggap sebagai simbol bagian dari dominasi kapitalisme internasional. Sebelum peristiwa itu sendiri terjadi sebenarnya mahasiswa telah melakukan serangkaian kegiatan untuk menciptakan kesadaran politik segenap lapisan masyarakat agar tahu, mau dan mampu mengontrol pemerintah. Aksi moral mahasiswa ketika itu dinodai oleh kerusakan, pembakaran toko dan modal, sehingga menyudutkan mahasiswa pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dalam peristiwa itu 9 orang meninggal dan 23 orang mengalami luka, sejumlah kendaraan dibakar, 700 orang ditahan polisi dan 45 orang diadili.¹⁰

Peristiwa Malari 1974 adalah pelajaran yang berharga sekali bagi rejim penguasa bahwa gerakan mahasiswa memiliki implikasi yang signifikan bagi pergeseran peta politik di tanah air. Gerakan mahasiswa telah terbukti mampu menciptakan *public distrust* yang dapat mempengaruhi keberadaan rejim penguasa. Karena itu menjadi

⁸ Schwarz, Adam, *A Nation in Waiting, Indonesia in the 1990s*, Allen & Unwin Pty. Ltd., St Leonards, Australia, 1994, p.57

⁹ Robinson, Richard, *Indonesia: The Rise of Capital*, Asian Studies Association of Australia/ Allen and Unwin, Sydney, 1986

¹⁰ Sanit, Arbi, hlm.54

mudah dimengerti apabila setelah peristiwa itu pemerintah melakukan upaya-upaya politik yang secara sistimatis dapat mengebiri gerakan mahasiswa. Salah satu bentuk upaya itu adalah terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nogroho Notosusanto No. 028/U/1974 yang memberi peluang birokrat kampus (Rektor dan Dekan) untuk membina kegiatan non-kurikuler mahasiswa yang dari sudut pandang pemerintah ditengarai selalu diisi aksi politik dengan landasan moral. Upaya-upaya politik yang dilakukan oleh rejim penguasa ternyata tidak membuahkan hasil seperti yang mereka harapkan. Bahkan yang terlihat ketika itu adalah gerakan-gerakan mahasiswa justru memperoleh bentuk kendatipun belum bisa dikatakan mapan. Mereka mulai membangun jaringan lagi yang lebih luas, dengan mengkonsepsikan sasaran-sasaran tertentu yang dituju menjadi terumuskan lebih jelas. Itulah sebabnya meskipun Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 028/U/1974 tersebut berhasil mengkoyak keberadaan organisasi mahasiswa, SK tersebut tidak mampu menggoyahkan pikiran-pikiran kritis yang berkembang di kampus.

Puncak akumulasi kegelisahan, kekecewaan dan protes mahasiswa tersebut mencuat ke permukaan menjadi aksi-aksi mahasiswa di beberapa kota besar seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya pada bulan Januari 1978. Gerakan mahasiswa pada saat itu bukan hanya dalam kaitan keprihatian terhadap penderitaan rakyat tetapi juga usaha membangun opini mengganti pemimpin nasional. Kehadiran Dewan Mahasiswa dari pelbagai universitas di Indonesia ke gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat menuntut agar Presiden Soeharto turun karena dinilai telah menyelewengkan UUD45. Usaha membangun opini semacam itu dinilai sangat berani terutama karena ketika itu hampir semua kekuatan politik yang ada tidak punya nyali melawan kekuatan Presiden Soeharto.

Seperti dirasakan bersama pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan rejim Soeharto hanyalah semu, tidak ada pemberdayaan dalam arti masyarakat tidak pernah mandiri. Masyarakat terus-menerus ditekan dan dieksploitasi. Dengan dalih memelihara stabilitas, rejim ini setelah melihat gerakan-gerakan politik yang terjadi selama tahun 1970-an, pada saat itu semakin

mengembangkan politik otoritarian dengan menempatkan negara pada posisi yang sangat sentral. Politik otoritarian tersebut terefleksi dalam pelbagai sendi kehidupan. Slogan 'monoloyalitas' terus mereka pertahankan, terutama karena dianggap sebagai instrumen yang sangat ampuh untuk melestarikan politisasi birokrasi. Implikasi dari politisasi birokrasi ini adalah para birokrat tidak netral, sebaliknya justru menjadi kepanjangan tangan rejim yang berkuasa. Hubungan antara pemerintah dan institusi birokrasi tidak diwarnai oleh interaksi yang bersifat *partnership*, karena para birokrat lebih memerankan diri sebagai abdi negara, dan bukan pelayan publik yang baik. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mempertahankan strategi politik massa mengambang dan asas tunggal. Strategi politik demikian pada awal tahun 1970an dimaksudkan sebagai bagian dari upaya meredakan konflik politik, tetapi dalam prakteknya kemudian diberi tafsir menjadi depolitisasi. Tidak mengherankan apabila partai politik tetap mandul, tidak memiliki *sense of political crisis*, sehingga sangat sulit bagi mereka menangkap aspirasi masyarakat. Kualitas kader partai politikpun menjadi relatif rendah. Kader partai yang pandai dan kritis terhadap kebijakan pemerintah, selalu dianggap nakal dan tidak loyal, karena itu harus di-*recall*.

Gerakan mahasiswa yang ketika itu dianggap terlalu berhadapan dengan Presiden Soeharto kemudian direspons oleh penguasa dengan tindakan-tindakan yang bersifat represif. Tanggal 21 Januari 1978, Kopkamtib membekukan Dewan Mahasiswa semua universitas, dengan merujuk pada pendapat Presiden Soeharto bahwa pelbagai bentuk kritik yang disampaikan oleh mahasiswa haruslah dilandasi dengan data yang benar, sebab apabila tidak ada landasan yang jelas bisa membahayakan kehidupan bangsa dan merusak konstitusi. Tindakan represif tersebut ditindak-lanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef Nomer 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Melalui Surat Keputusan ini organisasi mahasiswa intra universitas ditata ulang, diredefinisi kembali, dalam bingkai paradigma politik rejim yang berkuasa. Dunia mahasiswa menjadi semakin sesak, ketika setahun kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef mengeluarkan lagi Surat Keputusan No.037/U/1979 yang mengatur bentuk dan susunan organisasi kemahasiswaan sedemikian

rupa yang tidak memungkinkan mereka melakukan kegiatan politik tanpa kontrol pemerintah. Kondisi inilah yang dikatakan oleh Irine H. Gayatri¹¹ sebagian organisasi mahasiswa mengalami pendomestikan politik. Hal serupa dialami oleh organisasi-organisasi ekstra mahasiswa yang lebih dahulu mandul setelah sebelumnya digarap secara sistimatis melalui wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia yang dibentuk tahun 1973, di bawah kontrol rejim penguasa.

Sejarah politik Indonesia kembali menjadi saksi bahwa upaya-upaya politik yang secara sistimatis dilakukan oleh rejim penguasa untuk mengebiri kegiatan mahasiswa ternyata sia-sia. Situasi kampus yang tidak kondusif bagi gerakan mahasiswa, memaksa sejumlah aktivis bergerak ke luar 'kandang'. Kampus hanya dipergunakan sebagai tempat untuk kuliah dan mendiskusikan hal-hal yang bersifat akademik, sedangkan gerakan-gerakan menentang ketidakadilan dan keserakahan dilakukan di luar kampus. Strategi itu pula yang membedakan gerakan mereka dengan gerakan mahasiswa di tahun 1970an. Di luar kampus malah mereka kemudian bertemu dengan kelompok-kelompok lain yang juga memiliki kesadaran serupa. Inilah yang kemudian dicatat oleh Irine H. Gayatri¹² bahwa represi pemerintah tersebut kemudian melahirkan format baru gerakan mahasiswa di era 1980-1990an yaitu munculnya kelompok-kelompok diskusi dimotori oleh kalangan kampus di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Yogyakarta. Kelompok-kelompok diskusi di luar kampus ini meskipun anggotanya tidak besar, kelompok tersebut bisa hidup, terutama karena perdebatan pelbagai fenomena dilandasi oleh pikiran-pikiran cerdas yang mereka timba dari bangku kuliah. Gerakan mahasiswa yang lebih banyak berada di luar kampus ini pula telah menciptakan perubahan pendekatan yang oleh Arie Sujito dicatat sebagai pergeseran dari elitisme ke populisme, dengan lebih beraliansi mahasiswa-rakyat daripada mahasiswa-militer atau mahasiswa-birokrat.¹³ Bersamaan dengan itu banyak beredar buku

baru dalam perspektif kritis, sehingga diskusi-diskusi yang mereka selenggarakan mampu memberi stimulan ide dan kegelisahan baru. Keadaan ini membuat para aktivis selalu skeptis terhadap kebijaksanaan pemerintah.

Benih-benih pikiran kritis yang ditebar melalui kelompok-kelompok diskusi secara perlahan tetapi pasti, ternyata membuahkan hasil yang sangat menakjubkan. Sejak awal tahun 1990an mereka sudah berani dengan lantang menyuarakan pelbagai bentuk penindasan yang terjadi di negeri ini. Di mata mereka rejim Soeharto adalah korup dan tidak bisa ditoleransi lagi. Keberanian ini sangat luar biasa, terutama karena ketika itu semua institusi politik benar-benar sedang dikuasi Soeharto. Soeharto adalah presiden atau petinggi institusi birokrasi yang memperoleh dukungan segenap birokrat melalui strategi monoloyalitas dan politisi birokrasi. Soeharto adalah ketua dewan pembina Golongan Karya, sebuah kekuatan politik yang memperoleh dukungan dari pelbagai kekuatan. Soeharto adalah bagian dari konglomerat yang nilai asetnya jutaan dolar. Soeharto adalah panglima tertinggi ABRI yang mampu menggerakkan pasukan dari berbagai kesatuan. Soeharto ketika itu benar-benar berada pada puncak strata politik, ekonomi dan militer. Karena itu gerakan-gerakan mahasiswa yang menentang keinginannya atau yang ingin menjatuhkannya pasti dilandasi oleh keberanian yang tiada tandingnya.

Seperti dicatat oleh Muridan S. Widjojo¹⁴, menjelang Pemilu 1997 gerakan mahasiswa mulai gencar melontarkan kritik bahwa Pemilu selama rejim Soeharto berkuasa tidak akan bisa pernah demokratis. Dalam Undang-undang Politik yang berlaku ketika itu disebutkan bahwa Ketua LPU adalah Menteri Dalam Negeri yang jelas menjadi bagian dari Golkar. Pegawai negeri tidak akan bisa menentukan pilihan sesuai dengan keinginannya karena pegawai negeri adalah bagian Korpri, dan Korpri mendukung Golkar. Karena strategi politik massa mengambang, PDI dan PPP tidak mampu membangun dukungan pada level bawah, sementara itu Golkar melalui pejabat-pejabat pemerintah dapat dengan leluasa

¹¹ Gayatri, Irine H., 'Arah Baru Perlawanan Gerakan Mahasiswa 1989-1993' dalam Muridan S. Widjojo et al, hlm. 65

¹² Ibid, hlm. 71

¹³ Sujito, Arie, 'Dari Elitisme Menuju Populisme: Pilihan Strategis Gerakan Mahasiswa Indonesia Era '90-'98', dalam Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan*, log cit., hlm. 178

¹⁴ Widjojo, Muridan S., 'Wacana Politik Aktivis Gerakan Mahasiswa 1998' dalam Muridan S. Widjojo, et al., hlm. 234

berhubungan dengan masyarakat. Bahkan PDI dibawah kepemimpinan Megawati berhasil dijatuhkan kemudian digantikan oleh Soerjadi, sehingga menimbulkan perpecahan dalam tubuh partai ini dan konflik itu kemudian menciptakan Peristiwa Sabtu Kelabu 27 Juli 1996 yang menelan banyak korban jiwa. Dengan latar belakang semacam itu, gerakan mahasiswa kembali berupaya membangun opini publik agar menolak hasil Pemilu 1997. Pemilu 1997 dianggap cacat hukum, cacat moral, cacat politik bahkan inkonstitusional. Gerakan mahasiswa 1990an mencapai apa yang diimpikan ketika berhasil menurunkan Presiden Soeharto setelah sebelumnya terjadi krisis ekonomi yang sangat mencemaskan. Perjuangan mereka tidak ringan, bahkan seperti dikatakan oleh Arief Budiman dibandingkan gerakan mahasiswa 1966 yang ketika itu Arief Budiman ikut serta, gerakan mahasiswa 1998 lebih memiliki keberanian dan lebih mandiri. Gerakan mahasiswa 1966 bisa berhasil karena dukungan kuat militer di belakangnya (terutama Angkatan Darat). Keadaan ini berbeda sekali dengan gerakan mahasiswa 1998 yang ketika itu militer masih relatif bersatu.¹⁵

Uraian yang telah disampaikan memperlihatkan bahwa gerakan mahasiswa adalah fenomena politik yang terjadi secara berulang dan menunjukkan bentuk yang teratur. Gerakan-gerakan mahasiswa tersebut bervariasi dari waktu ke waktu terkait dengan kekuatan sosial dan kekuatan intelektual yang membingkainya. Sasaran gerakan mahasiswa tahun 1960an terutama adalah menumbangkan rejim penguasa (Soekarno) yang dianggap tidak mampu lagi mengatasi krisis ekonomi dan krisis politik yang terjadi ketika itu. Bentuk organisasi yang mendukung gerakan mereka adalah organisasi-organisasi mahasiswa ekstra kampus yang sebagian besar menjadi bagian dari partai politik. Gerakan mereka juga didukung oleh kekuatan luar (terutama militer), dan pada perkembangannya kemudian terkooptasi dengan rejim penggantinya. Dengan dalih meneruskan perjuangan, sebagian dari aktivitis mereka berada di dalam pemerintahan, malah kemudian terlibat pada skenario mengikis kreativitas politik mahasiswa. Sebagian yang lain menolak masuk ke dalam pemerintahan, dan tetap konsisten dengan pikiran-pikiran

¹⁵ Budiman, Arief, op cit., hlm x-xi

kritisnya. Tendensi ini berbeda dengan gerakan mahasiswa tahun 1990-an. Mereka juga berusaha menurunkan rejim penguasa (Soeharto) yang dianggap tidak mampu mengatasi krisis ekonomi. Akan tetapi kegiatan mereka lebih mandiri, dalam arti tidak menjadi bagian dari organisasi ekstra kampus atau partai politik, dan juga tidak didukung oleh kekuatan militer. Kencenderungan ini kelihatannya berkaitan dengan strategi perjuangan mereka yang lebih populis, lebih kritis, lebih mengembangkan aliansi mahasiswa-rakyat daripada membangun aliansi mahasiswa-militer atau aliansi mahasiswa-birokrat.

Gerakan moral atau politik?

Seperti telah diungkapkan di depan bahwa pada awal rejim Soeharto berkuasa pandangan aktivis mahasiswa tentang gerakan dan organisasi mahasiswa sedikitnya terbelah kedalam dua pandangan. Pandangan pertama lebih bernuansa moral, dalam arti energi politik mahasiswa seharusnya diletakkan sebagai kekuatan penggerak perubahan ketika institusi birokrasi dan institusi politik tidak mampu melakukan peran sesuai dengan tuntutan sektor publik. Dengan kata lain energi itu digerakkan untuk meletakkan dan meluruskan kembali fungsi-fungsi mereka, karena apabila kondisi carut-marut politik tidak dihentikan, rakyat terus tertindas dan menderita. Dengan demikian dalam pandangan ini posisi mahasiswa berada di luar institusi birokrasi dan di luar institusi politik (partai politik), namun tetap melakukan fungsi kontrol politik. Peran politik semacam itu seharusnya bukan karena pilihannya, tetapi karena tugas utama mahasiswa adalah kuliah, menimba ilmu dan menjadi sarjana yang paripurna. Status dan peran mahasiswa sangat berbeda dengan politisi profesional, karena kelompok yang disebutkan terakhir ini memang mengabdikan hidupnya untuk kepentingan politik. Lalu bagaimana kalau ada mahasiswa yang ingin menjadi politisi profesional? Jawabnya adalah orang tersebut harus meletakkan atribut mahasiswanya, kemudian mengembangkan perilaku politik dan etika politik sebagaimana biasa dilakukan oleh politisi profesional.

Pandangan kedua lebih bernuansa politik. Berbeda dengan pandangan pertama yang meletakkan energi mahasiswa hanya

sebagai kekuatan pendobrak ketika institusi birokrasi dan institusi politik tidak bisa memainkan peran sesuai dengan tuntutan sektor publik, pada pandangan kedua ini energi mahasiswa harus ditempatkan sebagai kekuatan riil dalam percaturan politik. Karena itu ketika pada awal rejim Soeharto berkuasa ada tawaran untuk mahasiswa agar duduk di lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, maka menjadi sangat wajar apabila tawaran itu diterima. Kesediaan memenuhi tawaran semacam itu, akan membuat mahasiswa lebih bisa meneruskan perjuangan menegakkan kebenaran dan mencegah penindasan rakyat, khususnya dengan cara mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang diambil oleh lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Dalam konteks ini, posisi dan peran yang diambil oleh mahasiswa adalah tidak jauh berbeda dengan posisi dan peran politisi profesional. Posisi dan peran semacam inilah sebenarnya yang diragukan oleh banyak orang pada saat itu, karena boleh jadi mereka terjebak oleh *vested interest* rejim yang sedang berkuasa.

Tidak mudah menjawab apakah gerakan mahasiswa itu perlu dikerangkai gerakan moral ataukah gerakan politik. Secara pragmatis, pilihan itu tergantung situasi politik yang berkembang dan kemauan serta 'pilihan' mahasiswa sendiri. Mahasiswalah yang lebih tahu lapangan, dan mereka pulalah yang lebih mampu mempertimbangkan gerakan mana yang lebih efektif dan efisien dalam merealisasikan komitmennya.

Apapun strategi yang kelak dipilih, masing-masing pilihan secara sosiologis memiliki konsekuensi sendiri yang berbeda. Pilihan gerakan moral akan lebih menekankan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat membela rakyat agar tidak dieksploitasi oleh rejim penguasa atau agar rakyat lepas dari segala bentuk penindasan. Gerakan semacam itu seharusnya dengan jernih mampu merentang hak-hak rakyat yang dirampas, kemudian membangun kesadaran mereka bahwa apabila hak-hak tersebut tidak diambil lagi, atau apabila tidak dikembalikan oleh rejim penguasa yang merampasnya, maka bisa menciptakan krisis ekonomi dan krisis politik yang berkepanjangan. Dengan demikian gerakan moral sesungguhnya lebih menekankan pada membangun atensi dan oleh karena itu persoalan *claim* kerap kali sangat ditonjolkan. Forum utama untuk kegiatan semacam itu adalah media massa (baik cetak maupun elektronik), dan mahasiswa dituntut

menjadi komunikator yang mampu menjadi *broker* dari aspirasi dan kemauan rakyat dengan kebijaksanaan pemerintah. Untuk memainkan peran semacam itu mahasiswa harus memiliki *linkage* pada isu-isu yang sedang populer dan kasus-kasus aktual yang terjadi dalam masyarakat. *Linkage* pada isu-isu populer dan kasus-kasus aktual sangat penting bagi gerakan moral agar pelbagai tindakan yang dilakukan memiliki kadar visibilitas yang tinggi.

Karakteristik semacam itu agak berbeda dengan gerakan politik. Gerakan politik lazimnya lebih terarah pada upaya menciptakan aksi atas dasar kepentingan politik tertentu, memobilisasi dukungan rakyat untuk tujuan politik tertentu, serta mempertahankan kekuasaan dan kekuatan politik yang telah diraih atau dimiliki. Forum utama gerakan politik adalah mimbar politik yang terkait dengan institusi politik. Posisi mahasiswa pada gerakan semacam itu bukan lagi sebagai komunikator atau *broker* sebagaimana yang terlihat pada gerakan moral, tetapi lebih sebagai aktor politik yang memiliki kemampuan menerapkan kebijaksanaan politik tertentu. Agar bisa memainkan peran demikian dibutuhkan *networking* yang baik, keahlian meyakinkan rakyat agar mau memberi dukungan, serta kemauan membuka diri menerima pelbagai masukan. Hal-hal semacam itu sangat dibutuhkan supaya aktivis gerakan politik tidak terjebak dengan kooptasi, atau tergiur menanggapi isu-isu yang sebenarnya sudah usang. Satu hal yang harus terus dipelihara oleh para aktivis gerakan politik adalah komitmen bahwa mereka adalah bagian dari rakyat yang sedang mereka perjuangkan sendiri.***

Daftar Pustaka

- Budiman, Arief, 'Catatan Kritis Mencoba Memahami Si Bintang Lapangan 1998' dalam Arbi Sanit (editor), *Pergolakan Melawan Kekuasaan, Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*, Pustaka Pelajar dan Insist Press, Yogyakarta, 1999.
- Gayatri, Irine H., 'Arah Baru Perlawanan Gerakan Mahasiswa 1989-1993' dalam Muridan S. Widjojo dkk, *Penakluk Rezim Orde Baru, Gerakan Mahasiswa '98*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Hamka, *Gerakan Mahasiswa Indonesia (Studi Perbandingan Antara Gerakan Mahasiswa 1966 dan Gerakan Mahasiswa 1998)*, Thesis Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2000, tidak diterbitkan
- Mun'im DZ, Abdul, 'Gerakan Mahasiswa 1966 Di Tengah Pertarungan Politik Elite' dalam Muridan S. Widjojo dkk, *Penakluk Rezim Orde Baru, Gerakan Mahasiswa '98*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1999
- Muridan S. Widjojo dkk., *Penakluk Rezim Orde Baru, Gerakan Mahasiswa '98*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1999
- Robinson, Richard, *Indonesia: The Rise of Capital*, Asian Studies Association of Australia/Allen and Unwin, Sydney, 1986
- Sanit, Arbi, 'Gerakan Mahasiswa 1970-1973: Pecahnya Bulan Madu Politik', dalam Muridan S. Widjojo dkk., *Penakluk Rezim Orde Baru, Gerakan Mahasiswa '98*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999
- Sanit, Arbi, *Pergolakan Melawan Kekuasaan, Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*, Pustaka Pelajar dan Insist Press, Yogyakarta, 1999
- Schwarz, Adam, *A Nation in Waiting, Indonesia in the 1990s*, Allen & Unwin Pty. Ltd., St Leonards, Australia, 1994

- Sujito, Arie, 'Dari Elitisme Menuju Populisme: Pilihan Strategis Gerakan Mahasiswa Indonesia Era '90-'98', dalam Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan'. Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Aksi Politik*, Pustaka Pelajar & Insist Press, Yogyakarta 1999
- Widjojo, Muridan S., 'Wacana Politik Aktivis Gerakan Mahasiswa 1998' dalam Muridan S. Widjojo, dkk., *Penakluk Rezim Orde Baru, Gerakan Mahasiswa '98*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 234
- Woshinsky, Oliver H., *Culture and Politics*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1995